



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BANK INDONESIA (BI)  
**UNIT KERJA** : DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUSTINA DHARMAYANTI**
2. Jabatan : **KEPALA GRUP**
3. NHK : **271669**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **13.675.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 465 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
3. Tanah Seluas 328 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
4. Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **820.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRYO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NAV 1 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOBIL, WULING AIREV MOBIL LISTRIK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000



4. MOBIL, KIJANG INOVA ZENIX MOBIL HYBRID Tahun 2023,  
HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	430.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.970.174.908
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	17.895.174.908
III. HUTANG	Rp.	512.608.959
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.382.565.949

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.